

PERLAWANAN PEDAGANG KAKI LIMA DI LAMAN BOENDA KOTA TANJUGPINANG

**Oleh
Paul Samuelson Sitorus
NIM. 170569201051**

Abstrak

Salah satu pekerjaan yang saat ini dan keberadaannya masih tetap eksis yaitu berdagang dengan menggunakan lokasi emperan, trotoar jalan, ataupun fasilitas publik milik pemerintah setempat dimana para pedagang ini memiliki sebutan sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). Dewasa ini keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada daerah perkotaan sering dianggap membawa permasalahan seperti mengganggu kenyamanan lalu lintas, merusak tatanan kota, serta menimbulkan lokasi kawasan yang kumuh. Sama seperti halnya yang terjadi pada kawasan Laman Boenda kota Tanjungpinang, kawasan lahan yang merupakan dibuka sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat dan sekaligus tempat wisata bagi para pariwisataawan inilah kini dipenuhi dengan para pedagang kaki lima. Maka tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk perlawanan Pedagang Kaki Lima di Laman Boenda terhadap kebijakan pemerintah Kota Tanjungpinang. Adanya peraturan daerah mengenai ketertiban umum yang harus di jalankan oleh petugas satuan polisi pamong praja kota Tanjungpinang membuat pedagang kaki lima merasa tidak adil dengan kekuasaan dan kebijakan yang ada sehingga memunculkan perlawanan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlawanan yang dilakukan pedagang kaki lima berdasarkan teori James Scott ada dua bentuk perlawanan yaitu bentuk perlawanan tersembunyi dan terbuka. mengingat peran pedagang kaki lima yang besar dalam perekonomian lokal dan menjawab kebutuhan terhadap lapangan pekerjaan. Diperlukannya konsep yang mampu menempatkan dan mengakomodasi keberadaan pedagang kaki lima pada struktur ekonomi dalam struktur penataan wilayah kota. dibutuhkan perspektif konflik yaitu adanya akan kesadaran dan mekanisme yang melihat berbagai tindakan termasuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang merupakan bagian dari fakta konflik.

Kata kunci: Pedagang kaki lima, Kebijakan, Perlawanan

PERLAWANAN PEDAGANG KAKI LIMA DI LAMAN BOENDA KOTA TANJUGPINANG

Oleh
Paul Samuelson Sitorus
NIM. 170569201051

Abstract

One of the jobs that currently exists and still exists is trading using overhang locations, sidewalks, or public facilities belonging to the local government where these traders are known as Street Vendors. Nowadays, the existence of street vendors in urban areas is often considered to bring problems such as disturbing traffic comfort, destroying the structure of the city, and causing slum area locations. Just like what happened in the Boenda Boenda area, Tanjungpinang city, the area of land which was opened as a place of recreation for the community and at the same time a tourist spot for tourists is now filled with street vendors. So the purpose of this study is to describe the form of resistance from street vendors in Boenda Pages against the Tanjungpinang City government policy. The existence of a regional regulation regarding public order that must be carried out by the civil service police unit of Tanjungpinang city makes street vendors feel unfair with the existing powers and policies, thus giving rise to resistance. The results of the study indicate that the resistance carried out by street vendors based on James Scott's theory has two forms of resistance, namely hidden and open forms of resistance. considering the large role of street vendors in the local economy and responding to the demand for jobs. The need for a concept that is able to place and accommodate the existence of street vendors in the economic structure in the structure of urban area planning. the need for a conflict perspective, namely the existence of awareness and mechanisms that look at various actions including the formulation and implementation of policies that are part of the facts of the conflict.

Keyword: Street vendors, Government policy, Resistance